

ABSTRACT

Infrastructure development can be said to be one part of national development whose aim is to take steps to develop Indonesian people. Which means that development must aim to improve people's welfare, equalize development in Indonesia and fulfill people's needs by taking into account the interests of the community so that the results of development have a positive impact on people's lives, such as improving and increasing people's living standards. Policies made by the government must be based on the welfare of the people, so that development progress can be felt directly by the community. In this case, implementation is the stage of realizing the formation of targets and objectives of development by paying attention to the preparations and taking into account various possibilities that will occur, both failure and success and the challenges that will be faced. The purpose of this research is to look at the form and implementation of policies set by the district government. Tanjung Jabung Timur towards the development of road infrastructure in Mendahara sub-district. Data collected used descriptive qualitative research methods through interviews, observation, literature study and documentation. Data analysis was carried out using the Miles & Huberman model starting from the data reduction stage, data presentation and drawing conclusions. The results of this research show that the form and implementation of road infrastructure development policies have been implemented well. This can be measured through indicators of public policy implementation according to Edward III with four factors determining the success of a policy including communication, resources, disposition and bureaucratic structure. Although there are still problems such as the government's response not being fast enough to handle this road and so on.

Key words: public policy, policy implementation, road infrastructure development

INTISARI

Pembangunan infrastruktur dapat dikatakan salah satu bagian dari pembangunan nasional yang tujuannya sebagai langkah untuk membangun manusia Indonesia. Yang berarti bahwa pembangunan itu harus bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat, pemerataan pembangunan di Indonesia dan pemenuhan kebutuhan masyarakat dengan memperhatikan kepentingan masyarakat sehingga hasil pembangunan tersebut berdampak positif bagi kehidupan masyarakat seperti perbaikan dan peningkatan taraf hidup masyarakat. Kebijakan yang dibuat oleh pemerintah harus berdasarkan kepada kesejahteraan rakyat, agar kemajuan pembangunan tersebut dapat dirasakan langsung oleh masyarakat. Dalam hal ini Implementasi merupakan tahapan realisasi pembentukan sasaran dan tujuan suatu pembangunan dengan memperhatikan persiapannya dan memperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi baik kegagalan maupun keberhasilan serta tantangan yang akan dihadapi. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bentuk dan penerapan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah kabupaten Tanjung Jabung Timur terhadap pembangunan infrastruktur jalan di kecamatan Mendahara. Data yang dikumpulkan menggunakan metode penelitian kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, studi kepustakaan dan dokumentasi. Analisis data dilakukan menggunakan model Miles & Huberman mulai dari tahap reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa bentuk dan penerapan kebijakan pembangunan infrastruktur jalan sudah dijalankan dengan baik. Hal dapat diukur melalui indikator implementasi kebijakan publik menurut Edward III dengan empat faktor penentu keberhasilan suatu kebijakan diantaranya faktor komunikasi, sumberdaya, disposisi, dan struktur birokrasi. Walaupun masih terdapat permasalahan seperti respon pemerintah yang kurang cepat dalam menangani kerusakan jalan tersebut dan lain sebagainya.

Kata kunci : kebijakan publik, implementasi kebijakan, pembangunan infrastruktur jalan